

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum.....	19
B. Tinjauan Tentang Korban Perkosaan	21
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi	32
D. Tinjauan Tentang Perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Bahan Penelitian.....	47
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	49
D. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Indonesia.	52
1. Quo Vadis Pelindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	52
2. Disparitas Putusan Pengadilan Dikaitkan dengan Pelindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Indonesia	66
B. Pelindungan Hukum yang Seharusnya Diwujudkan Bagi Korban Perkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Indonesia.....	79
1. Pengecualian Pemidanaan Terhadap Korban Perkosaan yang melakukan Tindak Pidana Aborsi	82
2. Jangka Waktu Kehamilan Korban Perkosaan untuk Melakukan Aborsi....	91
3. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang Berhak Secara Hukum Terkait Pelaksanaan Aborsi untuk Korban Perkosaan.	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pasal Terkait Aborsi dalam KUHP	52
Tabel 2 Ketentuan Terkait Tindakan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	53
Tabel 3 Pengaturan Mengenai Hak Ibu Untuk Melakukan Aborsi dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	54
Tabel 4 Ketentuan Terkait Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak	54
Tabel 5 Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	55
Tabel 6 Pengaturan Terkait Pelaksanaan Aborsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan	55
Tabel 7 Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/ PNMbn	68
Tabel 8 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/ PTJMB	71
Tabel 9 Pasal Terkait Aborsi dalam RUU KUHP 2019	80
Tabel 10 Pasal Terkait Aborsi dalam RUU KUHP 2022	81
Tabel 11 Pasal Terkait Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	94